JAKD
JURNAL ADMINISTRASI KARYA DHARMA

Jurnal Administrasi Karya Dharma
Volume 5 Nomor 2 (2026) September 2026
E-ISSN 2829-8292

Strategi Digitalisasi Data Administratif Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Welimana Kabupaten Malaka

Maria Yaneana Seran[1)*], Dimas Agustian[2)], Sulistio Diliwanto Binsasi[3)],Marthen Patiung[4)], Hermenegildus K. Talan[5)]
[1,2,3,4,5)] Universitas Timor, Indonesia
email: mariayaneanas@gmail.com [1)], dimas.agustian.adm@unimor.ac.id [2)], anto01binsasi@gmail.com [3)], marthenpaitiung62@gmail.com [4)], christianustalan@gmail.com [5)]

(Diterima Juli 2026); Disetujui Agustus 2026); Dipublikasikan September 2026)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi digitalisasi data administratif dalam meningkatkan kinerja pelayanan di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Camat Weliman, Sekretaris Camat, pegawai Kantor Camat, serta masyarakat yang menerima pelayanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan empat dimensi transformasi digital, yaitu strategi, sumber daya manusia, proses, dan struktur, diketahui bahwa strategi digitalisasi telah mulai direncanakan melalui pemanfaatan perangkat yang tersedia dan usulan pengadaan sarana teknologi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas komputer dan jaringan internet, kemampuan pegawai dalam pengoperasian teknologi digital yang belum merata, serta pengelolaan data administratif yang masih dilakukan secara manual. Meskipun demikian, terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi yang tersedia, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana digital. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman masih berada pada tahap pengembangan dan masih memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun pendanaan.

Kata kunci: Strategi Digitalisasi; Data Administratif; Transformasi Digital; Kinerja Pelayanan; Pelayanan Publik.

Abstract

This study aims to analyze the strategy for administrative data digitalization in improving service performance at the Weliman District Office, Malaka Regency. This condition is influenced by limited information technology infrastructure, inadequate human resource competencies, and budget constraints that hinder the implementation of digital transformation in public service delivery. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Head of Weliman District, the District Secretary, district office employees, and community members receiving public services. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the administrative data digitalization strategy at the Weliman District Office has not yet been implemented optimally. Based on the four dimensions of digital transformation, namely strategy, human resources, process, and structure, the digitalization strategy has been initiated through the utilization of available equipment and proposals for additional technological facilities. However, its implementation continues to face several obstacles, including limited computer facilities and internet connectivity, uneven digital competencies among employees, and administrative data management that remains largely manual. Nevertheless, the district government has made efforts to improve staff capacity, maximize the use of existing technology, and coordinate with the local government to support the procurement of digital infrastructure. The study concludes that the administrative data digitalization strategy at the Weliman District Office remains in the development stage and requires stronger support in terms of policy, human resources, technological infrastructure, and funding.

Keywords: Digitalization Strategy; Administrative Data; Digital Transformation; Service Performance; Public Services.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam. Keberagaman ini menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dan layanan publik. Salah satu isu yang masih menonjol adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), maupun pembiayaan (Kementerian PAN-RB, 2020). Dalam era digital saat ini, sistem administrasi pemerintahan dituntut untuk bergerak menuju integrasi berbasis teknologi informasi. Digitalisasi data administratif menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui digitalisasi, data dapat diolah dan diakses dengan cepat, pelayanan publik lebih mudah diberikan, serta koordinasi antar instansi menjadi lebih lancar (Rukmana, 2022). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang cukup serius.

Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan mendasar. Di banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, ketersediaan koneksi internet masih belum stabil, bahkan ada wilayah yang sama sekali tidak terjangkau jaringan internet. Pada tahun 2025, tercatat masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum terkoneksi internet sama sekali (Republika, 2025) (https://ameera.republika.co.id/berita/t38fgg416/menkomdigi-2333-desa di indonesia-belum-terkoneksi-internet). Selain itu, perangkat keras seperti komputer, laptop dan printer di berbagai kantor pemerintahan kecamatan masih sangat terbatas. Perangkat yang digunakan umumnya sudah berusia lama dan tidak mampu mendukung aplikasi digital terkini (Yudho & Pratama, 2023).

Kedua, faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan besar. Aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan banyak yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Literasi digital masih rendah, pelatihan teknis jarang dilakukan, dan manajemen perubahan masih lemah. Tidak sedikit pegawai yang masih merasa nyaman dengan pola kerja manual sehingga menunjukkan resistensi terhadap penggunaan sistem digital. Hal ini membuat upaya digitalisasi seringkali berjalan lambat dan tidak berkelanjutan (Sutrisno, 2021). Padahal, kompetensi SDM merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan transformasi digital di sektor pemerintahan.

Ketiga, keterbatasan anggaran menjadi masalah yang tidak kalah penting. Digitalisasi membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik untuk membangun infrastruktur, pengadaan perangkat keras, maupun penyediaan perangkat lunak. Selain itu, pemeliharaan sistem secara berkelanjutan juga memerlukan biaya operasional tambahan. Namun, dalam kenyataannya, anggaran pemerintah daerah, termasuk kecamatan, sering kali terbatas dan lebih banyak difokuskan pada program-program lain yang dianggap lebih mendesak. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih sering ditempatkan sebagai prioritas sekunder, sehinggah inisiatif digitalisasi rawan terhenti di tengah jalan (Kominfo RI, 2024)

Kantor Camat Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai salah satu instansi pemerintahan di

daerah yang tergolong wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kondisi geografis yang jauh dari pusat kabupaten serta keterbatasan infrastruktur menjadikan proses pelayanan publik sering mengalami kendala. Selain itu, bahwa keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja juga menjadi hambatan utama. Saat ini, Berdasarkan observasi awal dan wawancara langsung dengan Bapak Blasius Bria Nahak, S.KM., M.KM Selaku Kepala kantor camat Weliman pada tanggal 3 november 2025 didapatkan bahwa Kantor Camat Weliman hanya memiliki satu unit komputer dalam kondisi rusak, dua unit laptop satu di antaranya rusak dan satu lainnya masih berfungsi dengan baik, serta dua unit printer yang seluruhnya dalam keadaan rusak. Kondisi tersebut memperlambat proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena sebagian besar pekerjaan harus dilakukan secara manual. Akibatnya, efisiensi kerja menjadi rendah dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum dapat optimal.

Selain itu, masih banyak aparatur yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pelatihan teknis serta kurangnya pendampingan dalam penerapan sistem digital. Pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi juga hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, bukan oleh pihak kecamatan atau instansi di tingkat daerah. Keadaan ini menyebabkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital masih terbatas. Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi awal dan wawancara langsung dengan Bapak Blasius Bria Nahak, S.KM., M.KM selaku Kepala Kantor Camat Weliman, yang dilakukan pada tanggal 3 November 2025. Berikut ini akan dilampirkan data kepegawaian Kantor Camat Weliman sebagai bukti bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman masih tergolong rendah.

Tabel 1
Data Kepegawaian Di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tingkat Kependidikan
1	Bapak Blasius Bria Nahak, S.KM., M.KM	Laki-laki	Camat	S2
2	Yovita G. Seran, S.Sos	Perempuan	Sekretaris	S1
3	Joaquim J. Amaral	Laki-laki	Kasi Trantib	SMA
4	Esmaralda R. Maisad	Perempuan	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	SMA
5	Kunegunde B. Bereka, A.Md	Perempuan	Pengadministrasian Umum	D3
6	Fransisca J. Mendonca	Perempuan	Pengadministrasian Umum	SMA
7	Gregorius Seran	Laki-laki	Pengadministrasian Umum	SMA
8	Blandina Seuk	Perempuan	Pengadministrasian Umum	SMA
9	Wilfried Seran	Laki-laki	Pengadministrasian Umum	D3
10	Mikhael Nahak	Laki-laki	Pengadministrasian Umum	SMA
11	Yosep Naimmanu	Laki-laki	Pengadministrasian Umum	SMP
12	Visensia Luruk	Perempuan	Pengadministrasian Umum	SMA

Sumber : Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka, 2025

Tabel 1 menyajikan data mengenai kondisi kepegawaian di Kantor Camat Weliman yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) terkait digitalisasi data administratif masih tergolong rendah/tidak memadai. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang mahir dalam penggunaan laptop hanya sebanyak dua orang, yang keduanya memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1). Masalah anggaran merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam proses digitalisasi di Kantor Camat Weliman. Sebagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan dengan alokasi dana yang terbatas, Kantor Camat Weliman mengalami kesulitan dalam melakukan investasi besar untuk peningkatan infrastruktur digital. Keterbatasan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pengadaan perangkat dan sistem digital baru, tetapi juga pada aspek pemeliharaan dan operasional rutin yang diperlukan agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, dana operasional yang tersedia sering kali belum mampu menutupi biaya pemeliharaan sistem digital yang telah diterapkan, sehingga beberapa program digitalisasi berpotensi tidak berlanjut atau terhenti di tengah pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui digitalisasi data administrasi di Kantor Camat Weliman. Pernyataan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Wilfried Seran, selaku pegawai Kantor Camat Weliman, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Berikut disajikan data yang diperoleh langsung dari Bapak Wilfried Seran, yang menunjukkan bahwa Kantor Camat Weliman masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan untuk mendukung implementasi digitalisasi data administrasi.

Tabel 2
Anggaran Kantor Camat Weliman Dari Tahun 2021-2024

No.	Anggaran	Tahun
	Rp. 1.485.999.988 - Belanja Pegawai = Rp. 907.224.638 - Belanja barang / jasa = Rp. 578.775.350	2021
2.	Rp.1.535.685.530 - Belanja Pegawai = Rp. 1.314.306.382 - Belanja barang / jasa = Rp. 219.379.148	2022
3.	Rp. 1.655.816.430 - Belanja Pegawai = Rp. 1.404.512.200 - Belanja barang / jasa = Rp. 251.304.230	2023
4.	Rp. 1.661.816.430 - Belanja Pegawai = Rp. 1.448.893.076 - Belanja barang / jasa = Rp. 213.080.000	2024

Sumber : Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka, 2025

Tabel 2 menyajikan data anggaran di Kantor Camat Weliman selama empat tahun

terakhir, yaitu dari tahun 2021-2024, yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wilfried Seran selaku pegawai kantor Camat Weliman, diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung digitalisasi data administratif masih sangat terbatas. Meskipun menghadapi berbagai kendala, digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman tetap menjadi kebutuhan penting. Transformasi digital bukan hanya sekadar modernisasi teknis, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akurat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung agenda SPBE di tingkat nasional.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Digitalisasi Data Administratif Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam penerapan digitalisasi data administratif dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di Kantor Camat Weliman. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena berdasarkan kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Safrudin et al., 2023).

Fokus penelitian diarahkan pada strategi penerapan digitalisasi data administratif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Analisis dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yaitu strategi, sumber daya manusia (SDM), proses, dan struktur organisasi. Aspek strategi berkaitan dengan perencanaan dan arah penerapan digitalisasi, aspek SDM berkaitan dengan kesiapan aparatur dalam menggunakan teknologi digital, aspek proses mencakup perubahan mekanisme pelayanan dari sistem manual menuju sistem digital, sedangkan aspek struktur berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi (Royyana, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelayanan administratif, yaitu Kepala Kantor Camat Weliman, pegawai kantor camat, dan masyarakat pengguna layanan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi administrasi. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari informasi berupa perkataan, tindakan, serta dokumen pendukung yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Malelak, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi, pelaksanaan, serta kendala dalam penerapan digitalisasi data administratif. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan administratif, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi (Makbul, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi

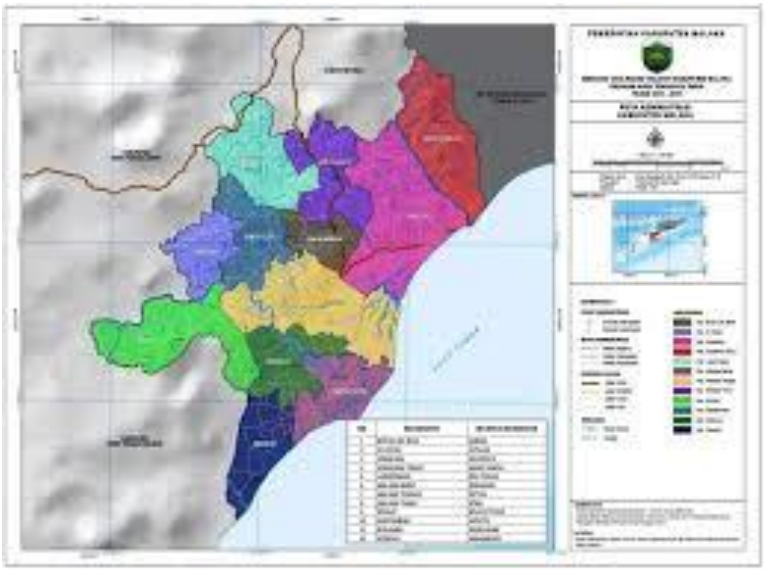
(Spradley & Huberman, 2024). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Tahap akhir dilakukan melalui proses interpretasi dan verifikasi untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh selama penelitian (Sugiyono dalam Spradley & Huberman, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Kabupaten Malaka

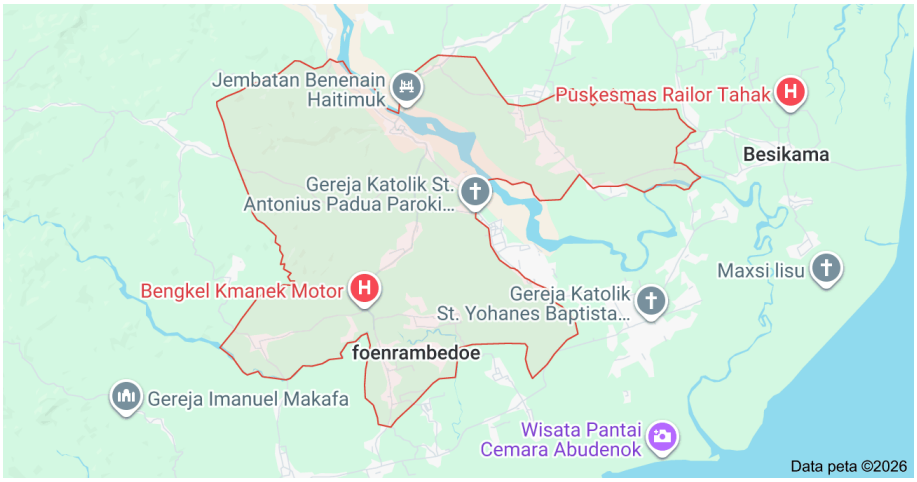
Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Belu. Ibu kota Kabupaten Malaka berada di Betun. Secara geografis, Kabupaten Malaka terletak di bagian selatan Pulau Timor dan berbatasan langsung dengan Timor-Leste. Kabupaten Malaka memiliki wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dan lahan pertanian yang cukup luas sehingga sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Selain pertanian, masyarakat juga bekerja pada sektor peternakan, perdagangan, dan jasa. Secara administratif, Kabupaten Malaka terdiri atas beberapa kecamatan yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan bagi masyarakat. Pada umumnya hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, (deskripsi data jika berbentuk tabel dan diagram yang isinya sama sebaiknya dipilih salah satu saja) kemudian ada bagian pembahasan. Seperti dalam *template* ini, ada sub-sub judul hasil dan pembahasan yang terpisah.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Malaka

Gambaran Umum Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka

Kecamatan Weliman merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah Kecamatan Weliman memiliki luas 88,25 km² berdasarkan data yang tercatat dalam rilis resmi Badan Pusat Statistik pada publikasi Kecamatan Weliman. Kecamatan ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Weliman terdiri dari 14 desa yaitu Desa Wesey, Haitimuk, Laleten, Kleseleon, Angkaes, Wederok, Lamudur, Forekmodok, Umalawain, Lakulo, Leunklot, Haliklaran, Bonetasea dan desa Taaba yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, dengan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan skala kecil. Sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, Kantor Camat Weliman bertanggung jawab dalam memberikan berbagai pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengelolaan surat-menyurat, pelayanan kependudukan, administrasi pemerintahan desa, serta koordinasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Camat Weliman terus melakukan berbagai pembenahan, termasuk melalui penerapan strategi digitalisasi data administratif guna mendukung efektivitas, efisiensi, akurasi data, serta kecepatan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 2. Peta Wilayah Kecamatan Weliman

Penyajian Data Fokus

Fokus utama dari penelitian ini adalah "Strategi Digitalisasi Data Administratif Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka", dengan subfokus penelitian ini menggunakan 4 (empat) dimensi Transformasi Digital Oleh Royyana (2018) yakni dimensi Strategi, dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), dimensi Proses, dan dimensi Struktur.

1. Strategi

Strategi menurut Teori Transformasi Digital oleh Royyana 2018 merupakan arah, kebijakan, dan rencana yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan transformasi digital. Dalam konteks Kantor Camat Weliman, strategi digitalisasi data administratif bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data administrasi. Strategi digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan komputer dalam pengolahan data, penyimpanan arsip secara digital, serta penerapan sistem administrasi yang lebih modern. Dengan adanya strategi yang jelas, pelayanan administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Strategi ini juga menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3. Bukti Data Strategi Transformasi Digital di Kantor Camat Weliman

No.	Unsur Strategi	Bukti/Temuan di Kantor Camat Weliman	Bentuk Strategi
1.	Arah	Kantor Camat Weliman mengarahkan pengelolaan data administrasi secara bertahap dari sistem manual menuju digital.	Digitalisasi data administratif secara bertahap
2.	Kebijakan	Pemanfaatan komputer dan teknologi yang tersedia mulai diarahkan untuk membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan.	Pemanfaatan fasilitas teknologi yang tersedia
3.	Rencana	Kantor mengusulkan pengadaan komputer, jaringan internet, dan sarana teknologi lainnya.	Pengembangan sarana dan prasarana digital
4.	SDM	Pegawai diberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi.	Peningkatan kompetensi pegawai
5.	Pelaksanaan	Digitalisasi dilaksanakan sesuai kemampuan kantor karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan anggaran.	Pelaksanaan secara bertahap
6.	Evaluasi	Penggunaan teknologi dan proses administrasi dipantau untuk mengetahui kendala dan kebutuhan perbaikan.	Pemantauan dan evaluasi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa strategi transformasi digital di Kantor Camat Weliman telah dilakukan secara bertahap. Strategi tersebut dimulai dari mengarahkan pengelolaan data administrasi dari sistem manual menuju digital, memanfaatkan teknologi yang tersedia, serta merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, kantor camat weliman juga berupaya meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih disesuaikan dengan keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Selanjutnya, penggunaan teknologi dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kendala serta melakukan perbaikan agar digitalisasi dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh informasi terkait Stretegi peneliti melakukan wawancara bersama kepala camat weliman yakni Bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; berdasarkan kebijakan peraturan presiden (PERPRES) nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) dan peraturan Menteri PAN-RB nomor 59 tahun2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Dari kebijakan tersebut strategi atau cara apa yang bapa terapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut? dari pertanyaan tersebut maka informen Bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Ya Baik, Cara yang kami terapkan adalah melaksanakan kebijakan tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan kantor. Kami memanfaatkan fasilitas yang tersedia, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai, serta mengusulkan penambahan sarana teknologi dan anggaran kepada pemerintah daerah. Kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara bertahap agar digitalisasi dapat terus ditingkatkan."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada kepala camat yakni Bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Apakah kebijakan peraturan presiden (PERPRES) nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) sudah berjalan di kantor camat weliman?dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

" Ya Baik SPBE sudah mulai kami terapkan, tetapi belum berjalan secara optimal. Kami masih melaksanakannya secara bertahap dengan memanfaatkan fasilitas yang ada"."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Pegawai/Staf kantor camat weliman yakni bapak Wilfried Seran, dengan pertanyaan; Bagaimana upaya yang dilakukan pegawai dalam mendukung strategi transformasi digital yang diterapkan oleh pimpinan meskipun pengelolaan data administrasi masih dilakukan secara manual? Dari pertanyaan tersebut maka informan bapak Wilfried Seran menjawab bahwa:

"Iya Baik, kami berusaha mengikuti arahan pimpinan dengan memanfaatkan komputer yang tersedia untuk membantu pekerjaan administrasi tertentu, meskipun sebagian besar data masih dicatat secara manual. Kami juga berusaha belajar menggunakan teknologi informasi dan mengikuti pelatihan yang diberikan agar ke depan dapat mendukung sistem pelayanan yang lebih modern dan berbasis digital."(3 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan weliman yakni Hendrikus Bria Seran, dengan pertanyaan; Bagaimana pendapat Bapak mengenai kualitas pelayanan administrasi di Kantor Camat Weliman saat ini? dari pertanyaan tersebut maka informan bapak Hendrikus Bria Seran menjawab bahwa:

"Pelayanan sudah cukup baik karena pegawai melayani dengan ramah, tetapi proses pengurusan surat terkadang masih memerlukan waktu yang cukup lama."(4 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan weliman yakni Hendrikus Bria Seran, dengan pertanyaan; Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan Kantor Camat Weliman untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi? dari pertanyaan tersebut maka informan bapak Hendrikus Bria Seran menjawab bahwa:

"Menurut kami, kantor camat perlu menyediakan lebih banyak fasilitas teknologi seperti komputer dan jaringan internet yang baik agar pelayanan lebih cepat. Selain itu, pegawai juga perlu diberikan pelatihan supaya dapat mengelola data secara digital. Dengan begitu proses pelayanan administrasi tidak lagi terlalu lama dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik." (4 Juni 2026)

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menurut Teori Transformasi Digital oleh Royyana 2018 merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Teknologi yang tersedia tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Dalam penelitian ini, dimensi SDM mengkaji kemampuan dan kesiapan pegawai Kantor Camat Weliman dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung pelayanan administrasi, memahami sistem digital, serta beradaptasi dengan perubahan pola kerja yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 4. Tingkat Kemampuan SDM dalam Menggunakan Komputer di Kantor Camat Weliman

No	Nama	Jabatan	Tingkat Kemampuan Menggunakan Komputer
1.	Blasius Bria Nahak, S.KM., M.KM	Camat	Tinggi
2.	Yovita G. Seran, S.Sos	Sekretaris	Tinggi
3.	Joaquim J. Amaral	Kasi Trantib	Sedang
4.	Esmaralda R. Maisad	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Sedang
5.	Kunegunde B. Bereka, A.Md	Pengadministrasian Umum	Sedang
6.	Fransisca J. Mendonca	Pengadministrasian Umum	Rendah
7.	Gregorius Seran	Pengadministrasian Umum	Sedang
8.	Blandina Seuk	Pengadministrasian Umum	Rendah
9.	Wilfried Seran	Pengadministrasian Umum	Sedang
10.	Mikhael Nahak	Pengadministrasian Umum	Rendah
11.	Yosep Naimmanu	Pengadministrasian Umum	Rendah
12.	Visensia Luruk	Pengadministrasian Umum	Rendah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat kemampuan SDM dalam menggunakan komputer di Kantor Camat Weliman masih belum merata. Dari 11 pegawai yang tercantum, terdapat 2 pegawai dengan kemampuan tinggi, 5 pegawai dengan kemampuan sedang,

dan 4 pegawai dengan kemampuan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pegawai sudah mampu menggunakan komputer untuk mendukung pekerjaan administrasi, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu hal penting dalam mendukung proses digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman. Untuk memperoleh data terkait sumber daya manusia (SDM) peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Camat Weliman yakni bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan;Bagaimana Bapak menilai kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Kantor Camat Weliman dalam mengelola data administrasi berbasis digital saat ini? dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Saat ini kemampuan SDM dalam pengelolaan data administrasi berbasis digital masih belum optimal. Sebagian pegawai sudah mampu mengoperasikan komputer untuk pekerjaan dasar, namun masih terdapat pegawai yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam penggunaan aplikasi administrasi dan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan data administrasi masih banyak dilakukan secara manual."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada Kepala Camat Weliman yakni bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Strategi atau solusi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi di Kantor Camat Weliman? dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Untuk meningkatkan kemampuan SDM, kami berupaya mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selain itu, kami mendorong pegawai untuk belajar secara mandiri dan saling berbagi pengetahuan mengenai penggunaan komputer dan aplikasi administrasi. Kami juga terus mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah agar kegiatan peningkatan kapasitas SDM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada pegawai Kantor camat weliman yakni Ibu Blandina Seuk, dengan pertanyaan; Bagaimana kemampuan Ibu dalam menggunakan teknologi informasi untuk pengelolaan data administrasi, dan apakah Ibu merasa siap jika seluruh pengelolaan administrasi di Kantor Camat dilakukan secara digital? dari pertanyaan tersebut informen Ibu Blandina Seuk menjawab bahwa:

"Kami memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer, seperti mengetik dokumen dan mengolah data sederhana. Namun, untuk penggunaan aplikasi administrasi yang lebih kompleks masih diperlukan pelatihan dan pendampingan. kami merasa siap karena penggunaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun kesiapan tersebut perlu didukung dengan pelatihan yang lebih intensif serta fasilitas komputer dan internet yang memadai." (3 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti juga bertanya lagi kepada pegawai Kantor camat weliman yakni Ibu Blandina Seuk, dengan pertanyaan; Bagaimana Ibu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja yang mulai memanfaatkan teknologi informasi?dari pertanyaan tersebut informen Ibu Blandina Seuk menjawab bahwa:

"kami berusaha belajar secara mandiri, meminta bantuan kepada rekan kerja yang lebih memahami teknologi, serta mengikuti arahan dari pimpinan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja berbasis digital." (3 Juni 2026)

3. Proses

Proses menurut Teori Transformasi Digital oleh Royyana 2018 adalah serangkaian kegiatan atau tahapan kerja yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi pemerintahan, proses mencakup seluruh prosedur dan mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian berjudul "Strategi Digitalisasi Data Administratif dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka", dimensi proses berfokus pada perubahan mekanisme kerja dari sistem manual menuju sistem berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan digitalisasi dalam proses administrasi mencakup penggunaan komputer untuk pencatatan data, penyimpanan dokumen secara elektronik, pengarsipan digital, serta pengolahan dan pencarian data yang lebih cepat.

Tabel 5. Proses Transformasi Digital di Kantor Camat Weliman

No.	Tahapan Proses	Kondisi Pelaksanaan
1.	Evaluasi sistem manual	Sudah dilakukan
2.	Identifikasi kebutuhan	Sudah dilakukan secara bertahap
3.	Pengadaan sarana	Masih terbatas
4.	Arahan kepada pegawai	Sudah dilakukan
5.	Pelatihan dan pendampingan	Dilakukan secara bertahap
6.	Pemanfaatan komputer	Sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya digital
7.	Penyimpanan data	Masih dalam tahap transisi
8.	Perbaikan pelayanan	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa proses transformasi digital di Kantor Camat Weliman sudah mulai dilaksanakan secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari evaluasi sistem manual, identifikasi kebutuhan, pengadaan sarana, pemberian arahan kepada pegawai, serta pelatihan dan pendampingan. Pemanfaatan komputer dan penyimpanan data secara digital juga sudah dilakukan, tetapi masih dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya digital. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki proses kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih terkendala keterbatasan sarana dan kemampuan SDM. Untuk memperoleh data terkait Proses perubahan digitalisasi data administratif peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Camat Weliman yakni bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Apa langkah awal yang dilakukan Kantor Camat Weliman dalam mempersiapkan perubahan sistem administrasi dari manual ke digital? dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Iya baik, Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi manual yang selama ini digunakan, termasuk mengidentifikasi kendala seperti lambatnya pencarian data dan risiko kehilangan arsip. Setelah itu, kami mulai merencanakan kebutuhan dasar seperti pengadaan komputer dan perangkat pendukung lainnya sebagai langkah awal menuju digitalisasi."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada kepala camat yakni Bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Apa saja tahapan persiapan yang dilakukan Kantor Camat Weliman dalam mengubah sistem administrasi dari manual menuju digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan?dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Iya baik, Tahapan persiapan yang kami lakukan dimulai dari evaluasi sistem kerja manual yang selama ini digunakan, kemudian melakukan pengadaan sarana seperti komputer dan perangkat pendukung lainnya. Selanjutnya kami memberikan arahan kepada pegawai untuk mulai beradaptasi dengan sistem digital, serta secara bertahap melakukan pelatihan dasar penggunaan teknologi informasi. Proses ini dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan kondisi SDM dan fasilitas yang tersedia di kantor."(2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada kepala camat yakni Bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Bagaimana perubahan proses pengelolaan data administratif di Kantor Camat Weliman sejak mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan?dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Sebelumnya seluruh proses administrasi dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan, penyimpanan dokumen, hingga pencarian arsip. Saat ini kami sudah mulai memanfaatkan komputer untuk membuat surat, mengetik dokumen administrasi, dan menyimpan sebagian data dalam bentuk digital. Walaupun penerapannya belum sepenuhnya digital, perubahan ini telah membantu membuat proses kerja menjadi lebih teratur, mengurangi kesalahan penulisan, serta mempercepat penyelesaian beberapa jenis pelayanan." (2 Juni 2026)

4. Struktur

Struktur menurut Teori Transformasi Digital oleh Royyana 2018 adalah susunan atau kerangka yang menggambarkan bagaimana suatu sistem, organisasi, atau proses kerja tersusun secara teratur sehingga setiap bagian memiliki peran dan hubungan yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian berjudul "Strategi Digitalisasi Data Administratif dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka", struktur merujuk pada tata organisasi dan pembagian tugas di Kantor Camat Weliman yang mendukung pelaksanaan digitalisasi data administratif. Struktur ini mencakup bagaimana alur koordinasi antara pimpinan (camat), sekretariat, dan staf/pegawai dalam mengelola data dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Struktur yang baik sangat penting dalam proses digitalisasi karena menentukan kelancaran koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta kejelasan peran setiap pegawai dalam penggunaan sistem digital. Jika struktur organisasi tersusun dengan baik, maka implementasi

digitalisasi akan lebih mudah dilakukan, karena setiap bagian mengetahui tugasnya masing-masing dalam penginputan, pengolahan, dan penyimpanan data administratif.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Weliman

Dari gambar diatas struktur organisasi kantor camat weliman dipimpin oleh seorang camat sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi langsung kelompok jabatan fungsional dan sekretaris kecamatan. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan tiga sub-bagian dibawahnya antara lain Kasubag Umum dan Aparatur, Kasubag Perencanaan, serta Kasubag Keuangan.Struktur ini juga memiliki komponen pembantu lain seperti Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tingkat operasional dan pelaksanaan teknis, terdapat beberapa seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, serta Kasi Ketentraman dan Ketertiban. Untuk memperoleh data terkait struktur dalam mendukung proses digitalisasi data administratif dikantor camat weliman peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Camat Weliman yakni bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di Kantor Camat Weliman diatur untuk mendukung persiapan digitalisasi data administratif dari sistem manual ke sistem digital? dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Ya Baik, Struktur organisasi di Kantor Camat Weliman tetap mengikuti ketentuan yang ada, namun dalam mendukung digitalisasi kami melakukan penyesuaian pada pembagian tugas. Beberapa pegawai ditugaskan khusus untuk pengelolaan data dan penginputan ke komputer,

sementara yang lain fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar proses kerja lebih terarah dan digitalisasi dapat berjalan secara bertahap meskipun masih dalam tahap penyesuaian." (2 Juni 2026)

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada kepala camat yakni Bapak Blasius Bria Nahak, dengan pertanyaan; Apa peran pimpinan dalam mengatur struktur kerja agar proses persiapan digitalisasi data administratif dapat berjalan dengan efektif di Kantor Camat Weliman? dari pertanyaan tersebut informen bapak Blasius Bria Nahak menjawab bahwa:

"Baik, Sebagai pimpinan, saya berperan dalam mengarahkan dan mengatur pembagian tugas agar setiap pegawai memahami perannya dalam proses digitalisasi. Saya juga memastikan adanya koordinasi yang baik antara staf, serta mendorong kerja sama dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, saya memberikan arahan agar struktur kerja lebih fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan dari sistem manual ke digital." (2 Juni 2026)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, peneliti membahas temuan lapangan menggunakan kerangka Transformasi digital oleh Royyana (2018) yang mencakup empat dimensi: Strategi, Sumber Daya Manusia, Proses, Dan Struktur.

1. Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara, dimensi strategi dalam transformasi digital di Kantor Camat Weliman menunjukkan bahwa digitalisasi data administratif telah direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kantor. Strategi yang dilakukan meliputi pemanfaatan fasilitas yang tersedia, pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pegawai, evaluasi kebutuhan kantor setiap tahun, serta pengusulan penambahan sarana teknologi dan anggaran kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Weliman telah memiliki langkah strategis dalam mendukung digitalisasi, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana, anggaran, dan sebagian besar data masih dikelola secara manual. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori transformasi digital Royyana (2018) pada dimensi strategi, karena transformasi digital membutuhkan perencanaan, dukungan organisasi, pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian secara bertahap sesuai kondisi organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tri Hildayana dkk. (2025), Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur (2025), serta Rozali Ilham dan Abdhel Hasbi (2025) yang sama-sama menunjukkan bahwa digitalisasi membutuhkan dukungan teknologi, kesiapan organisasi, SDM, dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik. Persamaan tersebut memperkuat hasil penelitian di Kantor Camat Weliman, sedangkan perbedaannya terletak pada teori dan lokasi penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan teori transformasi digital Royyana (2018), sementara penelitian terdahulu menggunakan teori manajemen perubahan, pelayanan publik, dan E-government.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman telah sejalan dengan teori transformasi digital Royyana (2018), karena telah dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kemampuan pegawai, dan perubahan proses kerja. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat keterbatasan sarana teknologi, anggaran, kompetensi SDM, dan sistem digital yang belum terintegrasi. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan secara berkelanjutan agar digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

2. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Camat Weliman sudah sejalan dengan teori transformasi digital Royyana (2018). Hal ini terlihat dari adanya upaya peningkatan kemampuan pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembelajaran mandiri. Meskipun demikian, penerapannya belum optimal karena kemampuan teknologi antarpegawai masih berbeda dan sebagian pengelolaan administrasi masih dilakukan secara manual. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kompetensi SDM dalam menggunakannya.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Tri Hildayana dkk. (2025), Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur (2025), serta Rozali Ilham dan Abdhel Hasbi (2025) yang sama-sama menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik. Persamaannya terletak pada kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori manajemen perubahan, pelayanan publik, dan E-government, sementara penelitian ini menggunakan teori transformasi digital Royyana (2018) di Kantor Camat Weliman.

Secara keseluruhan, dimensi SDM dalam penelitian ini telah berjalan sesuai dengan teori transformasi digital, tetapi belum maksimal. Kemampuan pegawai untuk belajar dan beradaptasi sudah menunjukkan kesiapan menuju transformasi digital, namun masih diperlukan pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta dukungan fasilitas seperti komputer dan jaringan internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan digitalisasi data administratif dan meningkatkan kinerja pelayanan di Kantor Camat Weliman.

3. Proses

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi proses di Kantor Camat Weliman sudah sejalan dengan teori transformasi digital Royyana (2018). Hal ini terlihat dari adanya evaluasi sistem manual, perencanaan kebutuhan teknologi, penyediaan komputer, pelatihan pegawai, serta mulai digunakannya teknologi dalam pembuatan surat, pengolahan dokumen, dan penyimpanan data. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses kerja mulai diarahkan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital. Namun, penerapannya belum optimal karena sebagian administrasi masih dilakukan secara manual, keterbatasan sarana teknologi, kemampuan pegawai yang belum merata, dan belum adanya sistem digital yang terintegrasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, khususnya Tri Hildayana dkk. (2025), Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur (2025), serta Rozali Ilham dan Abdhel Hasbi (2025), yang sama-sama menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat membantu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efektivitas proses pelayanan administrasi. Persamaannya terletak pada adanya perubahan proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori manajemen perubahan, pelayanan publik, dan E-government, sedangkan penelitian ini menggunakan teori transformasi digital Royyana (2018) di Kantor Camat Weliman.

Dengan demikian, dimensi proses telah berjalan sesuai dengan teori transformasi digital, tetapi

masih dalam tahap awal atau transisi. Kantor Camat Weliman telah mulai mengubah mekanisme kerja dan memanfaatkan teknologi, tetapi masih membutuhkan pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi, peningkatan kompetensi pegawai, serta penyediaan sarana teknologi yang memadai agar proses administrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

4. Struktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur di Kantor Camat Weliman sudah sejalan dengan teori transformasi digital Royyana (2018). Hal ini terlihat dari adanya penyesuaian pembagian tugas, pemberian tanggung jawab kepada pegawai dalam pengelolaan dan penginputan data digital, serta peran pimpinan dalam memberikan arahan dan koordinasi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kemampuan pegawai dan sarana teknologi. Dengan demikian, struktur organisasi sudah mulai beradaptasi dengan kebutuhan transformasi digital, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dan koordinasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu Tri Hildayana dkk. (2025), Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur (2025), serta Rozali Ilham dan Abdhel Hasbi (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan membutuhkan kesiapan organisasi, dukungan pimpinan, SDM, dan teknologi. Persamaannya terletak pada pentingnya penyesuaian organisasi dalam mendukung digitalisasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori dan lokasi penelitian. Penelitian Hildayana menggunakan teori manajemen perubahan di KUA Kecamatan Medan Denai, Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur menggunakan teori pelayanan publik di Kecamatan Pakal, sedangkan Rozali Ilham dan Abdhel Hasbi menggunakan teori E-government di Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini menggunakan teori transformasi digital Royyana (2018) di Kantor Camat Weliman.

Secara keseluruhan, dimensi struktur telah berjalan sesuai dengan teori transformasi digital, karena organisasi telah melakukan penyesuaian tugas dan koordinasi untuk mendukung perubahan dari sistem manual menuju digital. Namun, agar lebih optimal, diperlukan peningkatan kemampuan pegawai, sarana teknologi, koordinasi, dan dukungan pimpinan sehingga struktur organisasi mampu mendukung proses digitalisasi secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi digitalisasi data administratif dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka dengan menggunakan kerangka transformasi digital Royyana (2018), dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi administratif telah berjalan sesuai dengan aspek-aspek utama transformasi digital, yaitu strategi, sumber daya manusia (SDM), proses, dan struktur organisasi. Pada aspek strategi, Kantor Camat Weliman telah melakukan berbagai upaya melalui perencanaan digitalisasi secara bertahap, pemanfaatan fasilitas teknologi yang tersedia, pelatihan dan pendampingan pegawai, evaluasi kebutuhan, serta pengusulan dukungan sarana dan anggaran kepada pemerintah daerah. Pada aspek SDM, penerapan digitalisasi didukung oleh adanya pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta kemauan pegawai dalam meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi untuk mendukung pekerjaan administrasi. Sementara itu, pada aspek proses, digitalisasi telah mulai diterapkan melalui penggunaan komputer dalam pembuatan surat, pengolahan dokumen, dan penyimpanan data sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Pada aspek struktur, terdapat dukungan organisasi melalui pembagian tugas, pemberian tanggung jawab dalam pengelolaan data digital,

serta arahan dan koordinasi dari pimpinan dalam mendukung proses transformasi digital.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi data administratif di Kantor Camat Weliman masih belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana teknologi, dukungan anggaran yang terbatas, kemampuan teknologi pegawai yang belum merata, serta sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital memerlukan penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan dukungan anggaran, pengembangan sistem administrasi digital yang terintegrasi, serta peningkatan koordinasi dan komitmen pimpinan. Dengan adanya upaya tersebut, digitalisasi data administratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Weliman Kabupaten Malaka.

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Agar template ini dapat diterapkan dengan tertib, penulis dapat mengunduh template dan menyimpan file dalam komputer pribadi dengan mengganti nama file, lalu menindih tulisan dalam template ini dengan artikel dari penulis, sebaiknya secara bertahap, tanpa menghapus sub-sub judul, tanpa mengubah format. Template ini ditulis menggunakan *Microsoft Word 2010*. Untuk memudahkan menulis sumber referensi, gunakan perangkat lunak seperti *Endnote, Mendeley, Zotero* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Alkahfi, Daffa, et al. "Konsep Dasar Menejemen Pelayanan Publik Dalam Tinjauan Literature Review." JMA 2.5 (2024).

Amirullah, Ravi Udin. Manajemen strategi pelayanan perpustakaan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan literasi mahasiswa . Dis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Azelya, Iis. "Pengaruh Digitalisasi Administrasi Desa dan Kompetensi Digital terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci." Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 2.6 (2025): 446-457.

Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477

Budiono, Pitojo, dan Maulana Mukhlis. "Peran Krusial Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik." Jurnal Publicuho 7.3 (2024): 1183-1189.

Rohayatin, Titin. Desain dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pelanggan . Penerbitan mendalam, 2024.

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, (2025) Manejemen Publik

Fadhli, M. (2020). Implementasi Manajemen Strategik Dalam Lembaga Pendidikan. Continuous Education: Journal of Science and Research, 1(1), 11–23. https://doi.org/10.51178/ce.v1i1.7

FAUZI RIZQON, FITRON ALVI. Penguatan Pendidikan Agama Islam Tentang Ubudiyah Melalui Pembelajaran Kitab Fathul Qorib (Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk). Diss. IAIN KEDIRI, 2020.

Hantono, S. E., Wijaya, S. F., & SE, M. (2025). Pengantar manajemen. Penerbit Widina.

Hazin, Burhan Ibnu. “Strategi Pengertian.” Pengembangan Kurikulum: Teori, Model, dan Praktik 240 (2024).

Hidayatullah, H. (2023). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Era Digitalisasi Di Smp Sultan Agung Seyegan Sleman Yogyakarta. ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2), 119–133. https://doi.org/10.47732/adb.v6i2.249

Hildayana, Tri, dkk. "Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai: Studi Kualitatif." Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 5.3 (2025): 696-704.

Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. Jurnal Genta Mulia, 15(2), 79-91.

Kasmiati, Kasmiati, Rizka Indahyanti, dan Endang Ruswiyani. "Korelasi Antara Strategi Pembelajaran Bahasa Dan Gaya Berpikir Siswa Kelas Sebelas Sma Plus Budi Utomo Makassar." VERBA: Jurnal Isu, Tren dan Studi Bahasa Inggris 3.1 (2025): 28-34.

Katadata. (2024). Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka 204,74 Ribu Jiwa.

Kementerian Kominfo RI. (2024). Laporan Infrastruktur TIK Nasional. Jakarta: Kominfo.

Kementerian PAN-RB. (2020). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Laudon, Kenneth C., and Jane Price Laudon. Management information systems: Managing the digital firm. Pearson Educación, 2004.

Lin Suwarno dan Dhani Ichsanuddin Nur. "Optimalisasi Digitalisasi KTP Dengan Sistem Pelayanan di Kecamatan Pakal." Jurnal Abdimas Indonesia 5.1 (2025): 114-122.

(Lestari, Paramita Boni. "Buku Ajar Manajemen Strategis.")

Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Malelak, Merlin Luisa, Lorens Riwu, dan Agustino Lukas Fischer Conterius. "Penerapan Keterampilan Berbicara pada Pemandu Wisata Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang." Konferensi Internasional tentang Ilmu dan Teknologi Terapan pada Ilmu Sosial 2022 (iCAST-SS 2022) . Atlantis Press, 2022.

Pearce, Robinson MGH. Strategi Manajemen 1 (ed. 10) Koran . Penerbit Salemba, 2008.

Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 55–67. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328

Republika. (2025). Menkomdigi: 2.333 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi Internet.

Rohayatin, Titin. Desain dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pelanggan . Penerbitan mendalam, 2024.

Rogers, David L. Peta jalan transformasi digital: membangun kembali organisasi Anda untuk perubahan berkelanjutan . Columbia University Press, 2023.

Royyana, Aang. Strategi transformasi digital pada pt. Kimia Farma (persero) Tbk . Universitas Gadjah Mada, 2020.

Rozali Ilham, dan AH Skd. "Tingkat Efektifitas Digitalisasi pada Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Medan Amplas." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4.2 (2025): 322-332.

Rukmana, D. (2022). Digitalisasi Administrasi Publik di Era SPBE. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(2), 145–158.

Saingan, A., Melati, R., Rahmawati, N., Andini, M., Erfiana, L., Khotimah, K., ... & Anggraeni, R. (2024). Konsep Dasar Menejemen Pelayanan Publik Dalam Tinjauan Tinjauan Pustaka. Jurnal Media Akademik (JMA) , 2 (5).

Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. Journal Of Social Science Research, 3(2), 1–15.

Sallu, S. (2023). Digitalisasi kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, 7(1), 342-351.

Siti, Marwiyah. "Buku Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi." (2023).

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif :84–77), 2(1. مم.

Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).

Sutrisno, B. (2021). Literasi Digital Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Administrasi Negara, 11(1), 34–45.

Wardani, Ari Kusumah, Muhammad Alvin, dan Rismayanti Rismayanti. "Perbandingan Administrasi Publik Pelayanan Publik Manual Dan Digital Di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Banjar." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 12.1 (2026): 1-6.

Widodo, Sri. STRATEGI MANAJEMEN: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan . Penerbit NEM, 2023.

Yudho, A., & Pratama, M. (2023). Tantangan Implementasi SPBE di Daerah 3T. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 7(3), 55–66.

Yunus, M., Ibrahim, M., Musnadi, S., Buchari, A. M., Maihani, S., Syauqi, T. M., ... & Sawitri, R. (2024). Manajemen strategi. Deepublish.

YUSMAN, Yanti; PUTRA, Randi Rian; SINAGA, Intan. Transformasi Administrasi Di Era Digital. Serasi Media Teknologi, 2024.

Zamsiswaya, Miswanto, Darsyah, S., & Syawaluddin. (2023). Model Deskriptif Manajemen Strategik-Linkungan Eksternal. Jurnal Adzkiya, VII(I), 46–58.

Manajemen Strategik-Linkungan Eksternal. Jurnal Adzkiya, VII(I), 46–58…

Peraturan perundang- undangan : Undang- undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk segera diatasi: Diunduh pada tanggal 19 Februari 2026

Link: https://ameera.republika.co.id/berita/t38fgg416/menkomdigi-2333-desa-di-indonesia-belum-terkoneksi-internet